

Sikap Gereja Terhadap Partisipasi Politik dan Relevansinya Bagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Sapankale

Alvary Exan Rerung^{1*} & Juliati Attu²

¹Sekolah Tinggi Theologia Intim Makassar

²Institut Agama Kristen Negeri Toraja

*Email: alvaryexan@gmail.com

Abstract: *This research talks about the high number of unhealthy politics when holding democratic parties in Indonesia. Money politics to the practice of bringing each other down, is still often carried out when democratic parties take place. As a result of this unhealthy politics, it eventually led to disharmony problems that led to divisions in society. This reality occurs in the Toraja Mamasa Church of the Sapankale Congregation. Based on the data obtained through preliminary observations and interviews, the fact that political practices are unhealthy occurs because the church seems passive and does not take action. This is because the church also does not know how to act towards the ongoing political participation. This paper aims to provide an understanding of the Church's attitude towards political participation which is good and right, so that the church can actively express its prophetic voice by participating in politics. Departing from that problem, using qualitative methods, interviews, and literature, the results of this study provide an understanding that politics has good goals and becomes bad if it is no longer oriented to the interests of society. That is why the Church must present itself as a good example in its participation in political dynamics. This will help church members participate in political activities, so as not to cause problems of disharmony and division.*

Keywords: *Church, politics, Sapankale Congregation, disunity*

Abstrak: Penelitian ini berbicara tentang tingginya angka politik tidak sehat ketika mengadakan pesta demokrasi di Indonesia. Politik uang hingga praktik saling menjatuhkan, masih sering dilakukan ketika pesta demokrasi berlangsung. Akibat dari politik tidak sehat tersebut, akhirnya menimbulkan masalah disharmoni hingga terjadi perpecahan dalam masyarakat. Realitas ini terjadi di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Sapankale. Berdasarkan data yang didapatkan melalui hasil observasi awal dan wawancara, fakta bahwa praktik berpolitik tidak sehat terjadi karena gereja terkesan pasif dan tidak melakukan tindakan. Hal itu dikarenakan gereja juga tidak tahu bagaimana seharusnya bersikap terhadap partisipasi politik yang berlangsung. Tulisan ini bertujuan memberikan pemahaman tentang sikap Gereja terhadap partisipasi politik yang baik dan benar, agar gereja bisa secara aktif menyatakan suara kenabiannya dengan ikut berpartisipasi dalam bidang politik. Berangkat dari masalah itu, dengan menggunakan metode kualitatif, wawancara, dan studi pustaka, hasil penelitian ini memberikan pemahaman bahwa politik itu memiliki tujuan yang baik dan menjadi tidak baik jika tidak lagi berorientasi pada kepentingan masyarakat. Itulah sebabnya, Gereja harus memunculkan dirinya sebagai contoh yang baik dalam partisipasinya terhadap dinamika politik. Hal ini akan membantu warga gereja dalam berpartisipasi terhadap kegiatan berpolitik, agar tidak menimbulkan masalah disharmoni hingga perpecahan.

Kata Kunci: Gereja, Politik, Jemaat Sapankale, Perpecahan

Article History :

Received: 20-03-2022

Revised: 02-06-2023

Accepted: 04-06-2023



1. Pendahuluan

Sejak Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 1945, sejak saat itu juga bangsa ini harus memiliki penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai kedaulatan. Dalam menyelenggarakan pemerintahan demi mencapai kedaulatan itu, diperlukan usaha-usaha yang bervariasi agar bisa mewujudkan-nyatakannya, seperti mendirikan partai politik, organisasi masyarakat, dan lembaga-lembaga lain yang berorientasi pada tindakan dan tulisan. Usaha-usaha yang bervariasi itulah yang Aristoteles maksudkan dengan Politik. Itulah mengapa, Aristoteles melihat politik haruslah berorientasi pada usaha-usaha, baik dalam bentuk tindakan atau tulisan, untuk menciptakan kedaulatan dalam pemerintahan.¹ Dalam menciptakan usaha-usaha yang bervariasi tersebut, dibutuhkan peran dari berbagai elemen untuk melaksanakannya. Masyarakat salah satunya. Itulah sebabnya, politik tidak bisa terlepas dari masyarakat bahkan sama sekali tidak boleh asing bagi masyarakat. Itulah mengapa Gerrit Singgih dalam tulisannya mengatakan politik sebagai suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan guna untuk menciptakan kebijakan yang bisa menguntungkan masyarakat.² Melihat apa yang dikatakan oleh Aristoteles serta Gerrit Singgih mengenai politik, tentu kita bisa dengan percaya diri memberikan kesimpulan bahwasanya politik itu adalah sesuatu yang memiliki tujuan baik (mulia) karena akan menciptakan kedaulatan dalam suatu bangsa dan berdampak baik bagi kehidupan masyarakat.

Salah satu kalimat populer dari Aristoteles yang dikutip oleh David Ming dalam tulisannya tentang keberadaan politik di tengah-tengah masyarakat adalah bahwa hakikat kehidupan sosial merupakan sebuah politik. Sebab, dimana ada sekelompok orang berkumpul melakukan interaksi, di situ pasti melibatkan pembahasan politik. Hal inilah yang disebut oleh Aristoteles sebagai natur alami dan tidak bisa dihindari oleh sebagian besar manusia.³ Sebab, ketika individu hendak menentukan posisinya dalam masyarakat, dengan maksud untuk menemukan kesejahteraan pada dirinya ataupun kelompok lain, maka individu tersebut harus bisa mempengaruhi orang lain atau lingkungannya, agar apa yang menjadi pandangannya diterima. Kegiatan tersebut adalah

¹ Aristoteles, *Politik* Terjemahan Saut Pasaribu (Yogyakarta: Narasi, 2017), 164.

² Emanuel Gerrit Singgih, *Iman Dan Politik Dalam Era Reformasi Di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000), 27.

³ David Ming, "Peranan Gereja Dalam Sistem Pemerintahan Yang Baik Di Indonesia," *JURNAL KADESI: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 1. No. 1 (2021): 87-88.

politik menurut Aristoteles. Di mana ada proses individu atau kelompok saling mempengaruhi, di situ ada politik. Itulah sebabnya, Aristoteles mengatakan bahwa setiap orang merupakan politisi.⁴

Hal tersebut juga relevan pada bangsa Indonesia. Sebab, bangsa Indonesia memiliki wadah melimpah tentang perkumpulan yang bisa membahas tentang politik. Salah satu contoh, bagi agama Kristen, Gereja bisa menjadi wadah sekelompok orang untuk berbicara mengenai politik.⁵ Berkaitan dengan hal ini, Gerrit Singgih mengatakan seperti yang dikutip oleh Jhon Simon bahwa pada dasarnya Gereja memang tidak boleh menutup diri bagi dinamika politik bangsa ini. Sebab, Gereja sendiri merupakan bagian dan tidak boleh memisahkan diri dari politik.⁶ Hal tersebut terbukti dengan tercatatnya dalam sejarah bahwa politik sudah menjalin hubungan dengan Gereja.

Gunce Lugo mengatakan, memang hubungan Gereja dengan politik pada awal Perjanjian Baru terjadi sebuah pemisahan (sekularisme). Politik dipandang oleh Gereja sebagai domain yang terpisah dari kehidupan Gereja. Politik berifat sekuler, sedangkan kehidupan Gereja selalu identik dengan ritual agama dan jauh dari perbuatan-perbuatan daging. Dengan pemahaman tersebut, Lugo mengatakan Gereja mula-mula sangat enggan melihat harmonisasi antara Gereja dan politik, sebab keduanya sangat bertentangan. Tetapi dinamika ini kemudian berubah dengan banyaknya peristiwa menegangkan terjadi pada Gereja mula-mula. Baik itu penyiksaan, pembunuhan, pemusnahan, dan lain-lain. Kejadian-kejadian tersebut mengharuskan Gereja harus berada pada sebuah perlindungan, yaitu pemerintah. Kemudian, pada abad keempat, Gereja mendapatkan perlindungan dari pemerintah dengan diakuinya agama Kristen sebagai agama Negara oleh Kaisar Konstantin Agung. Pengakuan ini sekaligus merupakan pengakuan terciptanya hubungan antara pemerintah dan Gereja.⁷ Hal ini yang kemudian menjadi landasan sejarah bagaimana Gereja ikut dalam arus politik pada suatu daerah.

⁴ Ibid.

⁵ Ni Nyoman Fransiska, "Entitas Gereja Dalam Berpolitik Di Indonesia (Tinjauan Sudut Etika Kristen)," *Voice Of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama* 2, No. 1 (2018).

⁶ John Christianto Simon, "Resensi Buku: Meniadakan Atau Merangkul? Pergulatan Teologis Protestan Dengan Islam Politik Di Indonesia," *Gema Teologi* 37, No. 1 (2013).

⁷ Gunce Lugo, *Manifesto Politik Yesus* (Yogyakarta: ANDI, 2009), 10-13.

Hubungan yang tercipta antara Gereja dan Negara, menurut Calvin seperti yang dikutip oleh Alister E. McGrath dalam tulisannya adalah keputusan yang tepat. Sebab baik Gereja maupun pemerintah yang selalu identik dengan politik, adalah hubungan yang berpusat pada Yesus Kristus. Jadi baik pelayanan yang dilakukan oleh Gereja maupun Negara, sama-sama berpatokan pada apa yang Yesus kehendaki. Itulah mengapa keduanya akan tetap berada pada tujuan yang sama, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat.⁸ Berbeda halnya dengan Marthin Luther yang melihat Gereja dan Negara sebagai sesuatu yang terpisah, ia melihatnya sebagai dua kerajaan yang terpisah. Tetapi pemisahan yang dimaksudkan Luther tidak seperti pemisahan dalam Gereja abad pertama. Luther juga mengakui pemisahan tetapi menurutnya, keterpisahan Gereja dan Negara tetap memiliki jalur singgung yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kesejahteraan masyarakat.⁹

Seperti yang telah dikatakan oleh Aristoteles dan Gerrit Singgih, seharusnya politik bisa memberikan dampak positif terhadap masyarakat, tetapi pada kenyataannya politik justru kadang menjadi bumerang negatif bagi masyarakat. Perpecahan, disharmoni hingga kekerasan seringkali terjadi akibat dinamika politik. Hal ini terjadi karena usaha-usaha yang dilakukan tidak lagi berorientasi pada kepentingan masyarakat, melainkan untuk kepentingan individu saja.¹⁰ Akibat dari itu, politik kini semakin melekat dengan pengertian-pengertian negatif bagi masyarakat, secara khusus bagi warga Gereja. Salah satu bukti didapatkan penulis melalui observasi awal di Gereja Toraja Mamasa (GTM) Jemaat Sapankale, dimana jemaat telah mengidentikkan politik dengan pengertian-pengertian yang negatif. Pengertian-pengertian negatif tersebut diperoleh oleh warga gereja, karena telah terjadi berulang kali disharmoni hingga perpecahan akibat politik yang di bawah ke dalam gereja. Menurut observasi awal penulis, hal tersebut terjadi karena warga gereja tidak memiliki pemahaman mengenai partisipasi politik dalam gereja yang baik dan benar.

Melihat realitas tersebut, tulisan ini hendak memberikan pemahaman tentang sikap Gereja terhadap partisipasi politik agar bisa diimplementasikan secara holistik di

⁸ Alister E. McGrath, *Sejarah Pemikiran Reformasi* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019), 280-282.

⁹ *Ibid*, 267-270.

¹⁰ Mifdal Zusron Alfaqi, "Memahami Indonesia Melalui Perspektif Nasionalisme, Politik Identitas, Serta Solidaritas," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 28, No. 2 (2016).

GTM Jemaat Sapankale, dengan harapan bahwa politik kembali bisa dipandang secara baik oleh warga gereja sehingga tidak memunculkan masalah disharmoni, perpecahan hingga kekerasan dalam gereja.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang juga berbicara tentang sikap gereja tentang partisipasi politik. Contohnya penelitian dari Adolf Bastian Simamora mengenai "Politik Menurut Alkitab dan Implikasinya bagi Peran Gereja dalam Pusaran Politik di Indonesia". Penelitian ini berbicara tentang gereja secara individual dapat menjadi politikus, sedangkan gereja secara institusional tidak berpolitik praktis. Penulis menitikberatkan kajiannya pada kitab Injil.¹¹ Contoh lainnya dari penelitian Abu Bakar dan Muh. Wahyu mengenai "Gereja dan Partisipasi Politik". Penelitian ini berbicara tentang sikap Gereja yang secara terang-terangan mendukung (berpihak) salah satu calon dalam sebuah pemilihan umum.¹² Penelitian ini juga berbicara tentang sikap Gereja tentang partisipasi politik. Namun, yang menjadi pembeda sebab secara khusus berbicara tentang masalah yang timbul akibat sebuah dinamika politik yang tidak sehat. Itulah sebabnya, penelitian ini hendak memberikan pemahaman tentang sikap gereja dalam partisipasi politik sebagai upaya preventif mencegah masalah yang terjadi sebab akibat dinamika politik yang tidak sehat.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif, juga mengikutsertakan metode wawancara dan studi pustaka. Anselm dan Juliet dalam bukunya menerangkan bahwa pentingnya menggunakan metode kualitatif sebab akan membantu dalam melakukan pemecahan-pemecahan masalah yang baru sedikit diketahui.¹³ Pemecahan-pemecahan masalah yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif akan dipahami secara deskriptif, baik melalui kata-kata maupun bahasa. Hal ini tentu akan membantu dalam memahami fenomena-fenomena yang dialami oleh subjek, misalnya tindakan, persepsi, perilaku, dan lain-lain. Tulisan ini tentu membutuhkan teori-

¹¹ Adolf Bastian Simamora, "Politik Menurut Alkitab Dan Implikasinya Bagi Peran Gereja Dalam Pusaran Politik Di Indonesia," *Voice Of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama* 2, No. 1 (2018).

¹² Abu Bakar dan Muh. Wahyu, "Gereja Dan Partisipasi Politik," *Vox Populi* 5, No. 1 (2022).

¹³ Anselm Straus & Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tatalangkah Dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 5-7.

teori serta sumber informasi lisan, itulah sebabnya juga penting menggunakan metode wawancara dan studi pustaka dalam mengumpulkannya. Hasil wawancara akan menjadi sampel yang kuat dan hasil studi pustaka menjadi landasan yang bisa menjadi penguat teori dan akan diletakkan pada bagian akhir artikel ini.¹⁴

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Kecamatan Nosu, Kabupaten Mamasa. Secara khusus mengambil tempat di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Sapankale. Informan dalam penelitian ini merupakan orang yang betul-betul tahu mengenai informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, serta beberapa dari informan terlibat langsung dalam masalah yang ada pada penelitian ini. Semua informan tersebut diberikan pertanyaan-pertanyaan sekaitan dengan informasi yang dibutuhkan oleh penulis. Selain wawancara, dalam memperoleh data, penelitian ini menggunakan observasi guna mengetahui dan mencatat fenomena serta kondisi objektif di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Sapankale. Semua data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif (*interactive analysis models*). Analisis ini dalam metode kualitatif setidaknya melakukan tiga kegiatan yang dilakukan secara bersamaan: Pertama, data yang telah dikumpulkan kemudian direduksi dengan cara menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan pengorganisasian, sehingga data terpilah-pilah; Kedua, data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk narasi; dan Ketiga, melakukan penarikan kesimpulan dari data yang telah disajikan pada tahap kedua.

3. Hasil dan Pembahasan

Pengertian Gereja

Secara keseluruhan, Gereja berasal dari tiga bahasa yang berbeda (akarnya). Pertama berasal dari bahasa Portugis, yaitu "*igreja*" dan kedua berasal dari bahasa Latin, yaitu "*ecclesia*", dan pada akhirnya berasal dari kata Yunani, yaitu "*ekklesia*" yang artinya bukan sekedar kumpulan orang, tetapi memiliki arti yang sangat khusus, yaitu jemaat, umat atau memanggil. Kata inilah yang sering kita jumpai dalam Perjanjian Baru, dan seringkali diberikan arti sebagai jemaat walaupun dahulu artinya adalah sidang/sidang-jemaat. Dewasa ini, kata *Ecclesia* sudah melekat dengan terjemahan Gereja Kristen, hal ini dikarenakan penerjemahannya berpatokan pada terjemahan yang ada di dalam

¹⁴ Sonny Eli Zaluchu, "Strategi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Di Dalam Penelitian Agama," *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* 4, No. 1 (2020).

Katekismus Heidelberg.¹⁵ Walaupun, seperti yang Boland dan Niftrik tegaskan dalam bukunya bahwa kata Kristen pada terjemahan *Ecclesia* tidak ada pada naskah aslinya, dan menurut mereka berdua kata Kristen seyogyanya sudah tidak diperlukan lagi, sebab *Ecclesia* sudah menjadi istilah yang khusus pada Gereja yang otomatis adalah Kristen.¹⁶

Jadi, secara etimologi kata *Εκκλησία* (*Ekklesia*) diartikan sebagai mereka yang dipanggil keluar. Mereka yang dipanggil keluar tersebut merupakan orang yang merdeka, bukan merupakan pelayan atau budak, dan mereka dipanggil oleh seorang bentara untuk berkumpul (berhimpun) dalam rangka menghadiri rapat rakyat. Dari akar makna tersebut, dewasa ini Gereja diberikan pemaknaan bahwa di mana ada yang dipanggil, dipanggil berkumpul (berhimpun) oleh Allah, itulah Gereja. Adalah kesalahan besar jika ada yang berkata bahwa Gereja adalah suatu organisasi yang hendak mendirikan suatu perkumpulan (perhimpunan) guna untuk mencapai suatu tujuan tertentu, sebab Paulus dengan tegas mengatakan bahwa pemanggilan yang terjadi untuk mendirikan perkumpulan, adalah kehendak Allah sendiri (bnd. Rm. 9:24; Ef. 4:1; 2 Tim. 1:9).¹⁷ Sedangkan, kata jemaat sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu "*jama'a*" yang memiliki arti berkumpul (mengumpulkan). Tetapi sekali lagi ditegaskan bahwa Gereja bukanlah organisasi atau sekelompok orang yang berkumpul atas inisiatifnya sendiri guna mencapai suatu tujuan, tetapi Gereja adalah perkumpulan yang dikehendaki oleh Kristus melalui Firman dan Roh.¹⁸

Dengan mempertimbangkan makna di atas, Luther dan Calvin seperti yang dikutip oleh Louis Berkhof dalam tulisannya sama-sama setuju dengan memberikan makna bahwa Gereja adalah sebuah persekutuan orang kudus, yang adalah perkumpulan orang yang telah disucikan oleh Kristus dan mereka tentu merupakan seorang percaya, dan perkumpulan itu menjadi satu dengan dikepalai oleh Kristus sendiri.¹⁹ Jadi, dengan berbagai uraian tersebut, tulisan ini dengan berani memberikan definisi tentang Gereja

¹⁵ Paulus Purwoto, "Tinjauan Teologis Tentang Gereja Sejati Dan Aplikasinya Bagi Pelayanan Gereja Kontemporer," *SHAMAYIM: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 1, No. 1 (2020).

¹⁶ G.C. Van Niftrik dan B.J. Boland, *Dogmatika Masa Kini* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016), 359.

¹⁷ Dapot Tua Simanjuntak dan Joseph Christ Santo, "Pengaruh Keteladanan Hidup Gembala Sidang Terhadap Pertumbuhan Gereja," *Kharismata: Jurnal Teologi Pentakosta* 2, No. 1 (2019).

¹⁸ Arozatulo Telaumbanua, "Peran Gembala Sidang Sebagai Pendidik Dalam Pertumbuhan Rohani Jemaat," *FIDEI: Jurnal Teologi Sistematika dan Praktika* 2, No. 2 (2019).

¹⁹ Louis Berkhof, *Teologi Sistematika Doktrin Gereja* (Surabaya: Momentum, 2017), 23.

yang adalah sebuah perkumpulan (persekutuan) orang yang telah dikehendaki langsung oleh Kristus, dan mereka percaya bahwa Kristuslah yang menyatukan mereka sekaligus menjadi kepala persekutuan mereka. gereja adalah benteng benteng-kebenaran dan sarana Allah untuk terus memberikan wejangan kekal kepada orang-orang percaya.

Pengertian Politik

Politik sebagai ilmu yang berkembang pada abad ke-19 berdampingan dengan banyak ilmu penting lainnya, seperti geografi, antropologi, sosiologi, dan lainnya, tentu tidak bisa dilepaskan dari demokrasi, hubungan kekuasaan, masyarakat, pendidikan, budaya, dan tentunya negara. Politik adalah *art to govern* atau seni memerintah, yang berasal dari bahasa Yunani (*polis*) untuk menyebut suatu kegiatan sekelompok orang dalam hubungannya dengan persoalan pemerintahan.²⁰

Pertama-tama, politik berorientasi pada persoalan kesejahteraan rakyat, dan kedua, menyangkut tentang perilaku pemerintah menjalankan kekuasaan yang telah dimandatkan oleh rakyat agar hal-hal yang hendak dilakukan oleh pemerintah dapat menjamin kedaulatan rakyat. Karena rakyatlah yang memberikan mandat pada mereka yang memegang kekuasaan, maka politik bisa dikatakan berbicara tentang rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan kedaulatannya wajib terjamin. Dewasa ini, politik diidentikkan sebagai ilmu yang berbicara tentang kajian hubungan kekuasaan, baik hubungan suatu negara dengan negara yang lain, negara dan masyarakat, ataupun sesama warga negara.²¹ Hubungan kekuasaan tersebut berorientasi pada penciptaan usaha-usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu, misalnya kesejahteraan masyarakat. Setidaknya, ada tiga kegiatan yang dilakukan dalam politik, yaitu:

1. *Decision Making*, atau yang sering disebut sebagai pengambilan keputusan menyangkut apa yang menjadi tujuan dalam dinamika politik itu sendiri.
2. *Public Policy*, atau kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut tentang alokasi dan distribusi nilai-nilai dalam lingkup masyarakat.
3. *Power and Authority*, sebab dalam rangka melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, maka diperlukan yang namanya *power* (kekuasaan) dan *authority*

²⁰ Abdul Hadi, "Posisi Wanita Dalam Sistem Politik Islam Perspektif Fenomenologi," *An Nisa'a* 12, No. 1 (2017).

²¹ Agung Fakhruzy, "Mendobrak Kedaulatan Rakyat Dalam Dandera Partai Politik," *Jurnal Politikom Indonesiana* 5, No. 1 (2020).

(wewenang) agar bisa menjalankan pembinaan kerjasama untuk meminimalisir konflik yang muncul.²²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sendiri, politik setidaknya memiliki tiga hal utama, yaitu:

1. Diperlukan pengetahuan tentang kenegaraan dan ketatanegaraan agar bisa mengurus mengenai sistem pemerintahan serta dasar pemerintahan itu sendiri.
2. Diperlukan sebuah kebijakan, siasat, dan lain sebagainya, guna matang dalam menghadapi pemerintahan negara atau terhadap negara lain.
3. Diperlukan cara bertindak yang efektif untuk bisa terus menghadapi dan menangani segala macam persoalan yang muncul.²³

Dengan uraian di atas, Gaylin mengartikan politik sebagai usaha-usaha yang dilakukan dalam menerjemahkan nilai-nilai ke dalam kebijakan umum agar bisa menjamin kedaulatan masyarakat. Nilai-nilai yang hendak ditransformasikan itu seperti kebajikan, keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Segala nilai-nilai ini tentu mengakar pada suatu tujuan utama, yaitu kedamaian dan kesejahteraan warga negara.²⁴ Akhirnya, semua definisi-definisi di atas, semuanya tercantum dalam pengertian yang diberikan oleh Aristoteles, yaitu sebagai berikut:

1. Politik berbicara tentang negara yang dalam konteks dahulu disebut dengan polis. Pembahasan ini mencakup tentang bentuk-bentuk ideal dari suatu negara. Artinya, bagaimana dalam suatu negara bisa membangun sebuah sistem, sehingga bisa menciptakan kelompok (misalnya kota atau desa) terbaik. Terbaik artinya mendapat kedamaian dan kesejahteraan.
2. Politik pasti bersinggungan dengan apa yang disebut kekuasaan. Menurut Aristoteles, untuk mewujudkan kelompok (negara, kota, atau desa) terbaik, yang merupakan cita-cita guna mencapai kebaikan bersama, kiranya diperlukan kekuasaan pada mereka yang diberikan mandat untuk mengelolah kelompok

²² Mohamad Rosyidin, "Integrasi Struktur Dan Unit: Teori Politik Luar Negeri Dalam Perspektif Realisme Neoklasik," *Global: Jurnal Politik Internasional* 10, No. 2 (2010).

²³ Khoiruddin Manahan Siregar, "Integrasi Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemberitaan Palsu (Hoax) Di Indonesia," *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 4, No. 2 (2018).

²⁴ Rahiman Dani, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Teori Dan Aplikasi* (Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia, 2021), 4.

tersebut. Kekuasaan ini diperlukan, sebab menjadi fondasi untuk bisa mengambil kebijakan dalam menerapkan sistem-sistem yang telah disepakati, guna mencapai tujuan, yaitu kedamaian dan kesejahteraan.

3. Konsep polis dari Aristoteles, memberikan pemaknaan dewasa ini bahwa politik berbicara tentang keberadaan warga negara sebagai entitas yang sangat penting dalam kehidupan kelompok, baik negara, kota, juga desa. Akhirnya, karena politik melihat warga negara sebagai entitas yang sangat penting, maka mereka yang diberi mandat untuk memerintah haruslah terus berusaha agar warga negara berada dalam kedamaian dan kesejahteraan.²⁵

Perpecahan Warga Jemaat Akibat Politik

Setelah melakukan observasi dan wawancara kepada beberapa warga gereja, data yang penulis peroleh kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif (*interactive analysis models*). Adapun hasil analisis data tersebut sebagai berikut: Menurut informan, di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Sapankale, terjadi perpecahan dalam lingkungan warga gereja akibat politik. Perpecahan dimulai ketika Desa Minanga Timur, tempat GTM Jemaat Sapankale berada melakukan pesta demokrasi, yaitu pemilihan kepala desa. Pada pesta demokrasi tersebut terjadi sebuah perbedaan pemahaman antara warga gereja, tentang calon mana yang hendak dipilih untuk menjadi kepala desa, agar kelak bisa diandalkan dalam segala urusan Gereja. Perbedaan pendapat tersebut semakin memanas sehingga menciptakan masalah disharmoni hingga perpecahan dalam gereja, sebab akibat mereka saling menjatuhkan. Akibat dari masalah tersebut, terciptalah dua kubuh dalam gereja, yaitu kubuh pendukung calon kepala desa A dan kubuh pendukung calon kepala desa B. Permasalahan kemudian semakin memanas, karena salah satu kubuh melakukan tindakan yang tidak terpuji dalam pesta demokrasi, yaitu dengan cara melakukan politik uang. Banyak juga warga gereja yang netral, kian memperkeruh pesta demokrasi dengan memegang ideologi, bahwa politik uang itu bermanfaat, sebab mereka betul-betul mendapatkan uang yang bisa digunakan untuk keperluan. Pemahaman warga gereja semakin kabur tentang pesta demokrasi yang baik, sehingga hal ini (perpecahan akibat politik) terus-menerus terjadi di GTM Jemaat Sapankale. Hal ini dikarenakan tidak ada yang memberikan wejangan kepada mereka,

²⁵ Raimundus Bulet Namang, "Negara Dan Warga Negara Perspektif Aristoteles," *JIDS: Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, No. 2 (2020).

bagaimana seharusnya menjalani pesta demokrasi dengan baik, sehingga Gereja yang seyogyanya adalah wadah mengedukasi, kini menjadi pasif karena tidak ada sosok yang bisa memberikan wejangan yang benar kepada warga gereja. Menurut informan, warga gereja yang mendukung politik uang sekitar 70% dari total keseluruhan warga gereja. Angka ini sangat besar, sebab menurut informan, warga gereja yang netral juga mendukung politik uang.²⁶

Berikut merupakan berbagai masalah yang timbul dalam gereja akibat perpecahan dikarenakan pesta demokrasi:

1. Banyaknya warga gereja yang ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa tersebut dan mendukung politik uang, politik saling menjatuhkan agar yang mereka jagokan bisa mendapatkan kemenangan. Akhirnya warga gereja yang netral mengambil kesimpulan bahwa seyogyanya Gereja tidak boleh ikut campur pada ranah politik, sebab politik itu tidak baik dan Gereja seharusnya selalu baik.²⁷
2. Maraknya politik uang berdampak pada warga gereja yang tidak peduli dengan bagaimana seharusnya pesta demokrasi itu dilakukan dan dengan mantap memilih berdasarkan banyaknya uang yang diberikan calon kepala desa kepada mereka. Menurut mereka, hal itu lebih bermanfaat untuk kebutuhan dalam keluarga. Imbasnya, ketika kepala desa yang banyak mengeluarkan uang terpilih, berdampak pada pembangunan desa yang tidak berjalan dengan baik. Hal ini terus-menerus tertanam dalam pikiran warga gereja, sehingga ketika ada pemilihan Bupati atau Dewan Perwakilan Rakyat, mereka juga memberikan patokan yang sama, bahwa mereka akan memilih calon yang memberikan uang kepada mereka. Akhirnya, politik uang di Jemaat Sapankale terus terjadi dari generasi ke generasi.²⁸
3. Banyak warga gereja yang memilih untuk berpindah Gereja sebab terjadi perselisihan. Tidak sampai di situ saja, bahkan ada warga gereja yang berselisih dengan keluarga mereka sendiri akibat dari pesta politik yang tidak sehat tersebut.

²⁶ Lolang, Wawancara oleh Penulis, Nosu, Mamasa, 26 Januari 2022.

²⁷ Limbong, Wawancara oleh Penulis, Nosu, Mamasa, 26 Januari 2022.

²⁸ Lolang, Wawancara oleh Penulis, Nosu, Mamasa, 26 Januari 2022.

4. Pada saat kepala desa telah terpilih, warga gereja yang mendukung kepala desa terpilih memperlihatkan sifat sombong kepada mereka yang pilihannya tidak menang. Hal ini kian memperkeruh suasana, sebab tindakan ini tidak dilakukan di luar saja tetapi juga dilakukan di dalam Gereja, apalagi jika ibadah telah selesai. Akibatnya, hal ini menimbulkan masalah disharmoni dan perpecahan terus terjadi.²⁹

Informan kemudian dengan tegas mengatakan bahwa masalah-masalah tersebut terjadi dikarenakan tidak adanya pemahaman benar tentang pesta demokrasi yang baik pada mereka, sebab akibat dalam lingkungan Gereja sendiri malahan banyak yang secara terang-terangan mendukung politik uang, politik saling menjatuhkan, yang adalah contoh politik tidak baik.³⁰

Sikap Gereja Terhadap Partisipasi Politik

Pada dasarnya, Gereja yang menolak keterlibatan dalam dinamika politik, itu karena warga gerejanya telah melihat realitas bahwa banyak kecurangan dan hal tidak baik yang terjadi dalam dunia politik. Itulah sebabnya, mengambil keputusan untuk tidak melibatkan Gereja pada aktivitas politik merupakan langkah yang tepat bagi mereka. Tetapi sejatinya Gereja tidaklah boleh menarik diri dari aktivitas politik yang ada. Gereja sebagai perkumpulan orang percaya, harus (wajib) mendampingi warga gerejanya dalam memberikan wejangan untuk menjalankan pesta demokrasi yang baik, agar terhindar dari politik kotor yang dapat menimbulkan masalah disharmoni hingga perpecahan pada gereja. Wejangan yang dimaksudkan adalah sebuah pembinaan di kalangan warga gereja, agar mereka dapat ikut berpartisipasi dalam dinamika pesta demokrasi dengan mengedepankan prinsip-prinsip kristiani. Itulah sebabnya, penting bagi Gereja untuk mengembangkan dasar-dasar teologis yang bisa dijadikan prinsip pelayanan dalam bidang politik.³¹

Menurut Zakaria J. Ngelow (Sekertaris Majelis Pertimbangan PGI), setidaknya ada beberapa poin penting yang bisa dijadikan prinsip-prinsip teologis oleh Gereja dalam pelayanannya di bidang politik, antara lain: Pertama, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Gereja merupakan orang-orang yang dipanggil serta diutus, maka

²⁹ U'tun, Wawancara oleh Penulis, Nosu, Mamasa, 26 Januari 2022

³⁰ Lolang, Wawancara oleh Penulis, Nosu, Mamasa, 26 Januari 2022

³¹ Zakaria J. Ngelow, "Turut Membina Indonesia Sebagai Rumah Bersama - Peran Gereja Dalam Politik Di Indonesia," *Jurnal Jaffray* 12, No. 2 (2014).

sudah seyogyanya Gereja keluar menyatakan Injil (Kabar Gembira) kepada semua orang. Oleh karena itu, Gereja harus bisa memfokuskan pelayanan politiknya terhadap semua orang, dan tidak fokus hanya pada warga gereja saja. Pelayanan politik Gereja tersebut mencakup mengenai upaya Gereja dalam menciptakan kedamaian, kesejahteraan, dan keadilan bagi semua orang; Kedua, seperti yang telah dipercayai oleh berbagai denominasi Gereja, bahwa salah satu tugas Gereja adalah menampakkan tanda-tanda Kerajaan Allah, maka dengan itu Gereja wajib ikut serta dalam mengupayakan keadilan, kesejahteraan, dan menjaga keharmonisan masyarakat. Oleh karena itu, Gereja menolak keras berbagai bentuk tindakan kekerasan, baik dalam aktivitas politik atau aktivitas lainnya.³²

Ketiga, salah satu ajaran Yesus dalam Injil yang terkenal berkaitan dengan pemerintahan, yaitu tentang, memberikan kepada Kaisar apa yang menjadi haknya, dan berikan kepada Allah apa yang menjadi hak-Nya (bnd. Mat. 22:21; Luk. 20:25; Mrk. 12:17), menurut Ngelow ini diartikan sebagai ketaatan kepada Allah lebih di atas dari pada pemerintah (bnd. Kis. 5:29). Oleh karena itu, ketika ada ketidakberesan dalam pemerintahan, seperti mengabaikan tanggung jawab kepada semua anggota masyarakat, atau hanya bersimpati pada pihak tertentu saja, maka Gereja wajib menunjukkan suara kenabiannya dengan melakukan protes sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, agar pemerintah kembali pada jalur yang benar. Nabi Hosea, Natan, Yesaya, Amos, Yesaya, dan lainnya pernah melakukan hal seperti itu ketika melihat realitas yang menyimpang dari jalur seharusnya; Keempat, dalam Kej. 1:26, jelas dikatakan bahwa manusia adalah gambar dan rupa Allah, oleh sebab itu Gereja harus mengambil sikap menentang jika terjadi diskriminasi dalam masyarakat, baik diskriminasi sosial, gender, dan ras. Politik saling menjatuhkan, tentunya tidak boleh, sebab yang hendak dijatuhkan juga merupakan gambar dan rupa Allah; dan Kelima, pemerintahan tercipta sebab adanya pemeliharaan langsung dari Allah, itulah sebabnya sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dengan selalu berorientasi untuk menegakkan keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian. Pemerintah yang demikian, diakui Alkitab sebagai hamba Allah (bnd. Rm. 13). Tetapi jika sebaliknya, pemerintah yang telah diberikan tanggung

³² Zakaria J. Ngelow, *Teks Dan Konteks Yang Tiada Bertepi* (Yogyakarta: Pustaka Muria, 2012), 184.

jawab malah bertindak sewenang-wenang, seperti menindas dan tidak berorientasi untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, serta keadamaian, maka menurut Alkitab pemerintah seperti itu adalah anti-Kristus (bnd. Why. 13).³³

Melihat ada begitu banyak prinsip-prinsip teologis yang harus dipegang oleh Gereja dalam pelayanan politik, maka berdasarkan hal itu, kita bisa menariknya ke dalam beberapa poin penarapan praktis untuk dilakukan Gereja, antara lain sebagai berikut:

1. Sudah menjadi kewajiban, bahwa salah satu suara kenabian Gereja yang tidak boleh redam dalam aktivitas politik adalah dengan terus mendorong pemerintah agar selalu ingat menjalankan tugas atas mandat yang diberikan sebagaimana mestinya. Tetapi harus selalu diingat, bahwa segala usaha sebagai bentuk partisipasi Gereja dalam mendorong pemerintah untuk memimpin sebagaimana mestinya haruslah dilakukan dengan cara yang tidak melanggar etika Kristen dan hukum yang berlaku. Gereja menolak keras kekerasan dan menjunjung tinggi kedamaian. Begitupun ketika hendak menyampaikan aspirasi sebagai bentuk alarm pengingat bagi pemerintah dalam menjalankan tanggung jawab sebagaimana mestinya.
2. Melakukan pembinaan kepada warga gereja dalam berbagai aspek politik agar mereka juga tahu tentang dinamika serta perkembangan aktivitas politik yang ada, dengan tujuan membuat mereka mengerti tentang partisipasi politik yang benar. Gereja biasanya hanya fokus melakukan pembinaan kepada orang tua saja, dan melupakan bahwa kaum pemuda yang merupakan tiang Gereja harus juga mendapat perhatian guna bisa menanamkan kepada mereka tentang nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam partisipasi politik, yaitu keadilan, komitmen, kejujuran, berani berkorban, cinta damai dan anti kekerasan, menjunjung kesetaraan, dan lain sebagainya. Walaupun saat ini (misalnya ada) Gereja telah kehilangan nilai-nilai tersebut dalam aktivitas politik, tetapi dengan melakukan pembinaan kepada kaum pemuda, kelak Gereja akan tampil dalam partisipasi politik dengan menjunjung nilai-nilai tersebut.
3. Gereja harus memberikan hak dan kebebasan kepada warga gereja untuk aktif dalam partai politik tertentu. Tetapi, sudah menjadi kewajiban bagi Gereja untuk

³³ Ibid, 185-186.

tidak memihak kepada salah satu partai tertentu, entah itu partai Kristen atau bukan, juga tidak boleh memihak kepada calon-calon legislatif, entah itu anggota jemaat atau bukan. Gereja hanya perlu memberikan wejangan kepada warga gereja agar memilih sesuai hati nurani, mana yang diyakini oleh mereka dapat menciptakan kadamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat.

4. Gereja memang tidak boleh pasif dalam aktivitas politik, tapi bukan berarti Gereja harus memberikan kesempatan kepada para calon menggunakan gedung Gereja dan ibadah-ibadah Gerejawi sebagai sarana kampanye. Gedung gereja serta ibadah Gerejawi hanya diindahkan untuk memberi wejangan kepada anggota jemaat tentang partisipasi politik dan tidak boleh dijadikan sarana kampanye oleh para calon.
5. Terakhir, Gereja harus secara tegas menghimbau anggota jemaat untuk menolak politik uang. Oleh karena itu, Gereja tidak boleh menerima sumbangan dari suatu partai politik atau para calon jika tujuannya hanya untuk membeli suara anggota jemaat secara halus.

Melihat beberapa poin contoh penerapan praktis di atas, maka hal yang terjadi di Jemaat Sapankale tentu bisa terminimalisir jika hal-hal di atas diterapkan oleh Gereja. Harus ada warga gereja yang berani (jikalau Pendeta tidak ada) menyuarakan sikap Gereja seperti yang telah dijabarkan di atas. Salah satu langkah efektif yang bisa diambil oleh Jemaat Sapankale adalah dengan melakukan pembinaan kepada warga gerejanya, baik pada orang tua dan kaum pemuda. Pembinaan ini bisa dilakukan oleh Badan Pekerja Majelis Gereja, maupun pada lingkup yang lebih luas yaitu Badan Pekerja Klasis. Secara khusus bagi kaum pemuda yang merupakan penerus estafet pemimpin Gereja, pembinaan yang dilakukan akan menjadi memori kolektif sehingga kelak dasar partisipasi politik dapat terimplementasikan dengan baik di lingkungan Gereja Toraja Mamasa Jemaat Sapankale.

4. Kesimpulan

Politik adalah sesuatu yang baik, sebab bertujuan untuk menciptakan kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat dalam suatu bangsa. Politik menjadi tidak baik sebab usaha-usaha yang dilakukan dalam berpolitik tidak lagi berorientasi pada kepentingan masyarakat, melainkan untuk kepentingan individu saja. Usaha yang mengedepankan

kepentingan individu ini seringkali berorientasi pada praktik-praktik berpolitik yang tidak sehat, seperti politik uang dan saling menjatuhkan. Praktik berpolitik tidak sehat seperti ini mudah masuk pada gereja yang warga gerejanya sama sekali tidak memahami sikap gereja terhadap partisipasi politik yang baik dan benar. Hal inilah yang membuat warga Gereja Toraja Mamasa Jemaat Sapankale menjadi pelaku dari praktik berpolitik tidak sehat ini. Partisipasi warga GTM Jemaat Sapankale terhadap praktik berpolitik tidak sehat ini dikarenakan tidak ada yang pernah memberikan pemahaman kepada mereka tentang sikap gereja terhadap partisipasi politik yang baik dan benar.

Alkitab memberikan referensi tentang beberapa prinsip-prinsip yang bisa dijadikan pedoman gereja dalam mengambil sikap terhadap partisipasi politik, antara lain: Injil mengharuskan gereja untuk aktif dalam partisipasi dan menyebarkan kabar gembira, sehingga dalam kegiatan berpolitik tidak terjadi praktik-praktik yang tidak sehat. Kejadian 1:26 mencatat tentang manusia merupakan gambar dan rupa Allah, hal ini harus menjadi referensi bagi gereja agar terus melihat sikapnya terhadap partisipasi politik agar terus mencerminkan gambar dan rupa Allah itu sendiri. Berdasarkan Roma 13, maka gereja harus secara aktif melihat bagaimana politik berjalan dengan baik sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Secara keseluruhan, Alkitab dengan tegas tidak menoleransi praktik berpolitik yang tidak sehat. Prinsip-prinsip berpolitik ini harus diajarkan kepada warga gereja, agar mereka bisa mengambil sikap dengan baik ketika berhadapan dengan praktik berpolitik yang tidak sehat. Prinsip-prinsip ini terutama harus diajarkan kepada pemuda, sebab merekalah yang menjadi penerus tongkat estafet pelayanan di gereja.

Referensi

- Alfaqi, Mifdal Zusron. "Memahami Indonesia Melalui Perspektif Nasionalisme, Politik Identitas, Serta Solidaritas." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 28, No. 2 (2016).
- Aristoteles. *Politik*. Yogyakarta: Narasi, 2017.
- Berkhof, Louis. *Teologi Sistematis Doktrin Gereja*. Surabaya: Momentum, 2017.
- Boland, G.C. Van Niftrik dan B.J. *Dogmatika Masa Kini*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016.
- Corbin, Anselm Straus & Juliet. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tatalangkah Dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Dani, Rahiman. *Dasar-Dasar Ilmu Politik Teori Dan Aplikasi*. Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia, 2021.
- Fakhruzy, Agung. "Mendobrak Kedaulatan Rakyat Dalam Dandera Partai Politik." *Jurnal*

- Politikom Indonesiana* 5, No. 1 (2020).
- Fransiska, Ni Nyoman. "Entitas Gereja Dalam Berpolitik Di Indonesia (Tinjauan Sudut Etika Kristen)." *Voice Of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama* 2, No. 1 (2018).
- Hadi, Abdul. "Posisi Wanita Dalam Sistem Politik Islam Perspektif Fenomologi." *An Nisa'a* 12, No. 1 (2017).
- Lugo, Gunce. *Manifesto Politik Yesus*. Yogyakarta: ANDI, 2009.
- McGrath, Alistair E. *Sejarah Pemikiran Reformasi*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019.
- Ming, David. "Peranan Gereja Dalam Sistem Pemerintahan Yang Baik Di Indonesia." *JURNAL KADESI: Jurnal Teologi dan Pendiidkan Agama Kristen* 1. No. 1 (2021).
- Namang, Raimundus Bulet. "Negara Dan Warga Negara Perspektif Aristoteles." *JIDS: Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, No. 2 (2020).
- Ngelow, Zakaria J. *Teks Dan Konteks Yang Tiada Bertepi*. Yogyakarta: Pustaka Muria, 2012.
- . "Turut Membina Indonesia Sebagai Rumah Bersama - Peran Gereja Dalam Politik Di Indonesia." *Jurnal Jaffray* 12, No. 2 (2014).
- Purwoto, Paulus. "Tinjauan Teologis Tentang Gereja Sejati Dan Aplikasinya Bagi Pelayanan Gereja Kontemporer." *SHAMAYIM: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 1, No. 1 (2020).
- Rosyidin, Mohamad. "Integrasi Struktur Dan Unit: Teori Politik Luar Negeri Dalam Perspektif Realisme Neoklasik." *Global: Jurnal Politik Internasional* 10, No. 2 (2010).
- Santo, Dapot Tua Simanjuntak dan Joseph Christ. "Pengaruh Keteladanan Hidup Gembala Sidang Terhadap Pertumbuhan Gereja." *Kharismata: Jurnal Teologi Pentakosta* 2, No. 1 (2019).
- Simamora, Adolf Bastian. "Politik Menurut Alkitab Dan Implikasinya Bagi Peran Gereja Dalam Pusaran Politik Di Indonesia." *Voice Of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama* 2, No. 1 (2018).
- Simon, John Christianto. "Resensi Buku: Meniadakan Atau Merangkul? Pergulatan Teologis Protestan Dengan Islam Politik Di Indonesia." *Gema Teologi* 37, No. 1 (2013).
- Singgih, Emanuel Gerrit. *Iman Dan Politik Dalam Era Reformasi Di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000.
- Siregar, Khoiruddin Manahan. "Integrasi Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemberitaan Palsu (Hoax) Di Indonesia." *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 4, No. 2 (2018).
- Telaumbanua, Arozatulo. "Peran Gembala Sidang Sebagai Pendidik Dalam Pertumbuhan Rohani Jemaat." *FIDEI: Jurnal Teologi Sistematika dan Praktika* 2, No. 2 (2019).
- Wahyu, Abu Bakar dan Muh. "Gereja Dan Partisipasi Politik." *Vox Populi* 5, No. 1 (2022).
- Zaluchu, Sonny Eli. "Strategi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Di Dalam Penelitian Agama." *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* 4, No. 1 (2020).